

LAPORAN



**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**

**TRIWULAN 2
TAHUN 2023**

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN TRIWULAN 2
HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGGUNA LAYANAN
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
TAHUN 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

Disahkan di Makassar
Pada hari Jumat, 7 Juli 2023

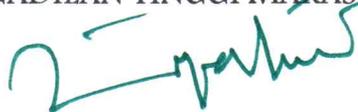
KETUA TIM SURVEI



MUHAMMAD DAMIS, S.H., M.H.
NIP. 19631025 199212 1 001

Mengetahui :

KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR



DR. H. SYAHRIAL SIDIK, S.H., M.H.
NIP. 19570503 198403 1 002

KATA PENGANTAR

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai Indeks Persepsi Anti Korupsi di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Makassar mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi yang dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Tinggi Makassar yang diambil dengan kuesioner secara daring dan dapat diakses di mana saja menggunakan aplikasi SISUPER yang disediakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Pelaksanaan survei ini merupakan kelanjutan implementasi perbaikan dari penilaian masyarakat pada survei periode sebelumnya, dan di dalam pelaksanaan survei dan laporan survei ini tentu masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Tinggi Makassar dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Tinggi Makassar.

Makassar, 7 Juli 2023

Ketua Tim Survei,



MUHAMMAD DAMIS, S.H, M.H.

NIP. 19631025 199212 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja	3
BAB II METODOLOGI	5
2.1. Metode Penelitian	5
2.2. Populasi Dan Sampel	5
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	6
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	6
2.5. Teknik Analisis Data	7
2.6. Tahapan pelaksanaan.....	8
BAB III INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI	10
3.1. Profil responden	10
3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi per indikator	15
3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar	23
BAB IV PENUTUP	27
4.1. Kesimpulan.....	27
4.2. Rekomendasi	29
4.3. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan	31
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

<i>No. Tabel</i>	<i>Halaman</i>
1. Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi.....	8
2. Nilai Persepsi	9
3. Responden Berdasarkan Umur / Usia	10
4. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	11
5. Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir	12
6. Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama	14
7. Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan	15
8. Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan	16
9. Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh.....	16
10. Indeks Pada Indikator Pada Transaksi Biaya.....	17
11. Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan.....	18
12. Indeks Pada Indikator Hadiah	19
13. Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya	20
14. Indeks Pada Indikator Percaloan	20
15. Indeks Pada indikator Perbuatan Curang	21
16. Indeks Pada Indikator Transaksi Rahasia.....	22
17. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada PT Makassar	23
18. Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada PT Makassar	24
19. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK) pada Survei Triwulan 4/2023 ...	27
20. Rencana Tidak Lanjut Perbaikan	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Tinggi Makassar merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Tinggi Makassar untuk menjadi satuan kerja menuju wilayah bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas

penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai di antaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya di luar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- h) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner melalui aplikasi SISUPER
 - b. Kelengkapan peralatan
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden melalui link aplikasi SISUPER.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Survei Persepsi Anti Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Makassar. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Morgan and Krejcie*, yaitu jumlah sampel responden ditentukan dari jumlah populasi survei harian selama 3 bulan terakhir. Lalu sampel responden diarahkan untuk mengakses kuesioner digital melalui website Pengadilan Tinggi Makassar yang terkoneksi ke aplikasi SISUPER Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Link aplikasi SISUPER diberikan kepada daftar pelanggan (pengguna) tetap layanan Pengadilan, dan juga kepada pencari keadilan yang menggunakan layanan pengadilan dalam waktu tertentu. Berikut *Customer Base* (daftar layanan) Pengadilan Tinggi Makassar :

No.	Jenis Layanan
A	KEPANITERAAN
	1. Pengaduan
	2. Pemberian Informasi
	3. Permohonan Banding
	4. Pembinaan dan Pengawasan
	5. Ijin Penelitian
	6. Advokat/Permohonan Sumpah
7. Perpanjangan Penahanan	
B	KESEKRETARIATAN
	1. Pengaduan
	2. Permohonan Informasi
	3. Pembinaan dan Pengawasan

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Tinggi Makassar.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan Tinggi Makassar.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka atau secara daring. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu enam bulan. Selanjutnya data diunggah oleh petugas pelaksana dari aplikasi SISUPER.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar). Wakil Ketua Pengadilan

Tinggi Makassar akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 - 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data Persepsi Anti Korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks Persepsi Anti Korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks Persepsi Anti Korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka Persepsi Anti Korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei Persepsi Anti Korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :



Gambar 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas

Tabel 1. Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 2. Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1. Umur / Usia

Responden menurut karakteristik umur/usia, ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3
Responden Berdasarkan Umur/ Usia

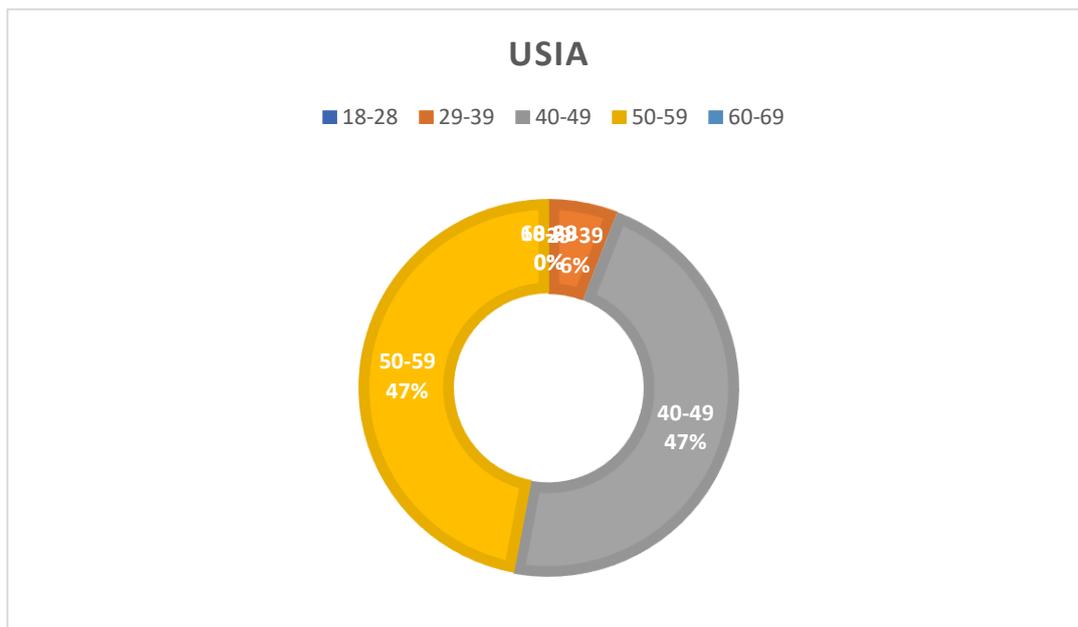
No	Umur / Usia	Frekuensi	%
1	18-28	0	0
2	29-39	3	5.88
3	40-49	24	47.06
4	50-59	24	47.06
5	60-69	0	0
Jumlah		51	100

Sumber : hasil pengolahan data kuesioner

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari total 51 responden, mayoritas responden pada survei ini yakni responden dengan rentan usia 40-49 tahun dan usia 50-59 tahun masing-masing sebanyak 24 orang (47.06%) dan yang paling sedikit yakni responden dengan rentan usia 29-39 sebanyak 3 orang (5.88%).

Karakteristik Rentan usia/umur dari 51 responden pada survei ini, secara ringkasnya disajikan dalam diagram berikut ini :

Gambar 2
Responden Berdasarkan Umur / Usia



Sumber : hasil pengolahan data kuesioner

3.1.2. Jenis Kelamin

Responden menurut karakteristik jenis kelamin, ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 4
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

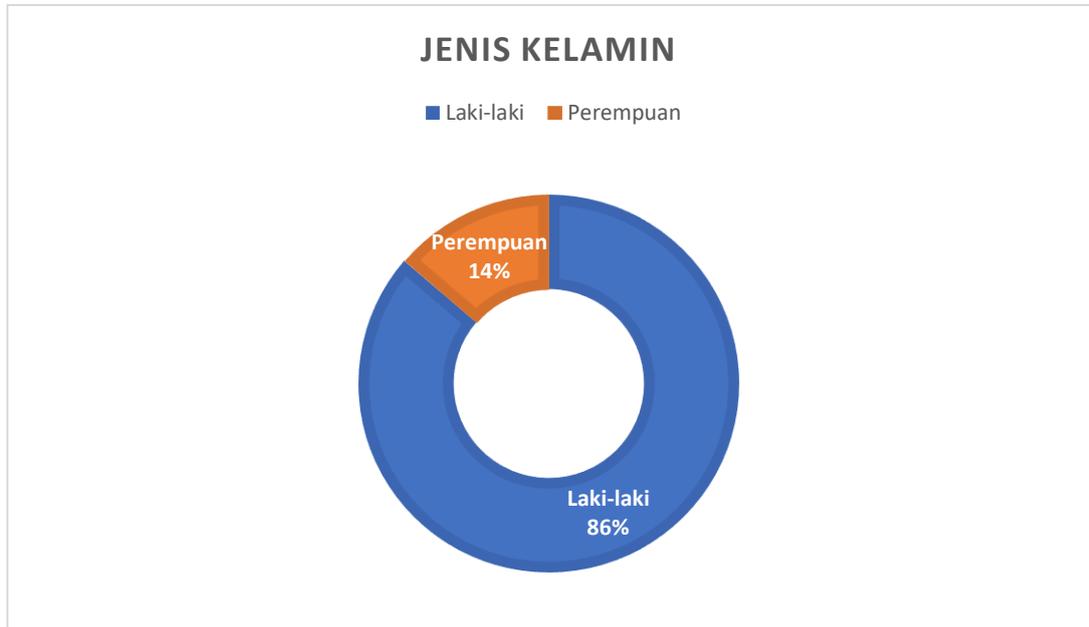
No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki - laki	44	86.27
2	Perempuan	7	13.73
Jumlah		51	100

Sumber : hasil pengolahan data kuesioner

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik Jenis Kelamin di atas bahwa dari total 51 responden, mayoritas responden pada penelitian ini berjenis kelamin laki-laki sebanyak 44 orang (86.27%) dan perempuan sebanyak 7 orang (13.73%).

Karakteristik Jenis kelamin dari 51 responden pada survei ini, secara ringkasnya disajikan dalam diagram berikut ini :

Gambar 3
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : hasil pengolahan data kuesioner

3.1.3. Pendidikan Terakhir

Responden menurut karakteristik Pendidikan terakhir, ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 5
Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	Tidak Sekolah	0	0
2	SD	0	0
3	SMP	0	0
4	SMA	0	0
5	D1	0	0
6	D2	0	0
7	D3	0	0
8	S1 / D4	26	50.98
9	S2	22	43.14
10	S3	3	5.88

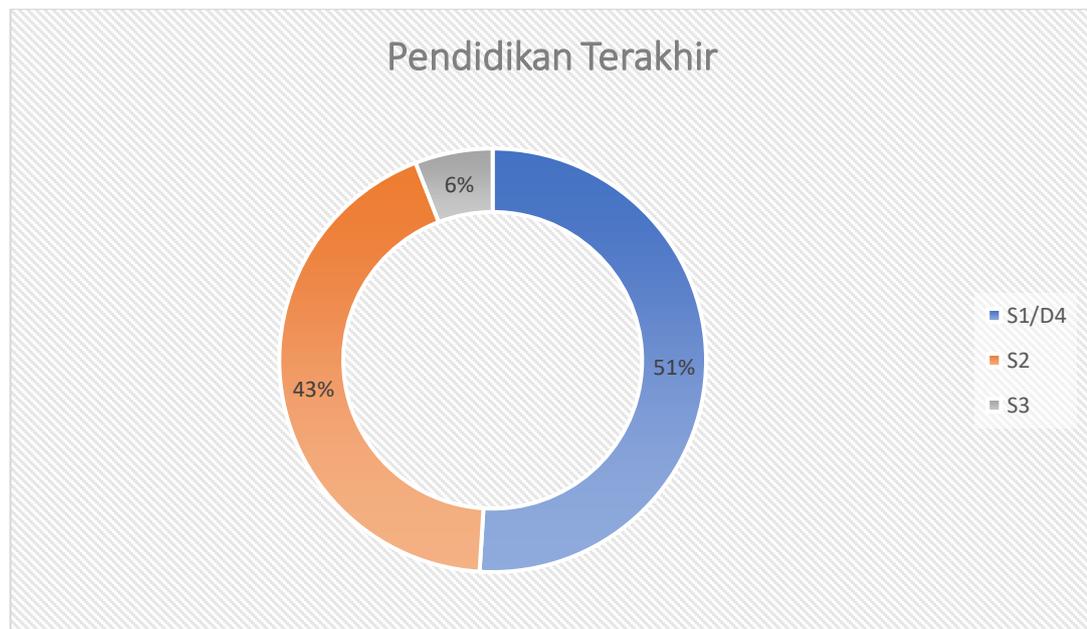
Jumlah	51	100
--------	----	-----

Sumber : hasil pengolahan data kuesioner

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik Pendidikan Terakhir di atas dapat diketahui bahwa mayoritas dari keseluruhan responden pada survei ini, adalah responden dengan pendidikan terakhir Sarjana (S1/D4) sebanyak 26 orang (50.98%) dan yang paling sedikit yakni responden dengan Pendidikan Terakhir S3 sebanyak 3 orang (5.88%).

Karakteristik Pendidikan Terakhir dari 51 responden pada survei ini, secara ringkasnya disajikan dalam diagram berikut ini :

Gambar 4
Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir



Sumber : hasil pengolahan data kuesioner

3.1.4. **Pekerjaan Utama**

Responden menurut karakteristik latar belakang pekerjaan, ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 6
Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama

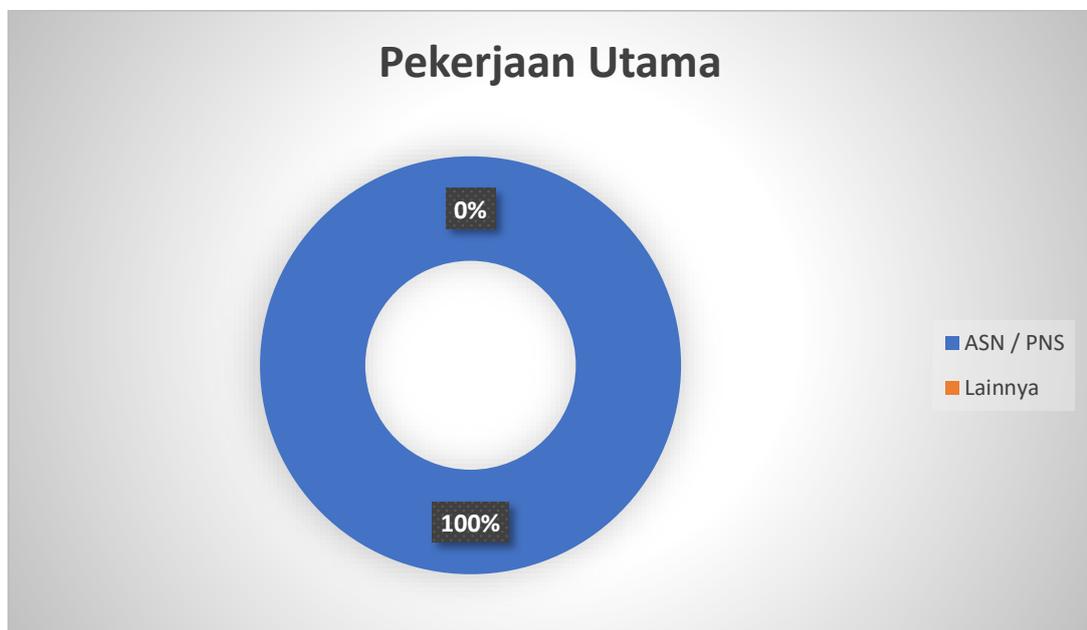
No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	ASN / PNS	51	100
2	TNI	0	0
3	POLRI	0	0
4	Swasta	0	0
5	Wirausaha	0	0
6	Tenaga Kontrak	0	0
7	Masyarakat Lainnya selaku Pencari Keadilan	0	0
Jumlah		51	100

Sumber : hasil pengolahan data kuesioner

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik Pekerjaan Utama di atas bahwa dari total 51 responden, mayoritas responden pada survei ini berprofesi ASN/PNS yakni sebanyak 51 orang (100%), dan tidak ada kategori responden paling sedikit.

Karakteristik Pekerjaan Utama dari 51 responden pada survei ini, secara ringkasnya disajikan dalam diagram berikut ini :

Gambar 5
Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama



Sumber : hasil pengolahan data kuesioner

3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada interval index 3,941.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar bersih dari Manipulasi Peraturan.

Tabel 7.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			F	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	1	1	1.96%	3,941
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	0	0	0%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	50	200	98.04%	
Jumlah			51	201	100%	

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 3,941.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

Tabel 8.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	1	1	1.96%	3,941
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	0	0	0%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	50	200	98.04%	
Jumlah			51	201	100%	

3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar bersih dari Menjual Pengaruh.

Tabel 9.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	

1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0%	4
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	0	0	0%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	51	204	100%	
Jumlah			51	204	100%	

3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,980.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar bersih dari Transaksi Biaya di luar dari yang telah ditetapkan secara resmi.

Tabel 10.

Indeks pada indikator transaksi biaya

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0%	3,980
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0%	

3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	1	3	1.96%
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	50	200	98.04%
Jumlah			60	203	100%

3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 3,941.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar bersih dari korupsi melalui Biaya Tambahan.

Tabel 11.

Tabel indeks pada indikator biaya tambahan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	1	1	1.96%	3,941
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	0	0	0%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	50	200	98.04%	
Jumlah			51	201	100%	

3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3,882.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar bersih dari pemberian/menjanjikan hadiah.

Tabel 12.

Indeks pada indikator hadiah

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	2	2	3.92%	3,882
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	0	0	0%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	49	196	96.08%	
Jumlah			51	198	100%	

3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,941.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar bersih dari ketidaktransparansi biaya.

Tabel 13.

Indeks pada indikator transparansi biaya

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	1	1	1.96%	3,941
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	0	0	0%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	50	200	98.04%	
Jumlah			51	201	100%	

3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar bersih dari praktik percaloan.

Tabel 14.

Indeks pada indikator percaloan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	

1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0%	4
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	0	0	0%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	51	204	100%	
Jumlah			51	204	100%	

3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar bersih dari tindakan perbuatan curang.

Tabel 15.

Indeks pada indikator perbuatan curang

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0%	4
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0%	

3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	0	0	0%
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	51	204	100%
Jumlah			51	204	100%

3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar bebas dari transaksi rahasia.

Tabel 16.

Indeks pada indikator transaksi rahasia

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0%	4
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	0	0	0%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	51	204	100%	
Jumlah			51	204	100%	

3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Makassar sebesar **3,96** atau **99,07%**.

Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi dimaksud seperti tertuang pada table berikut :

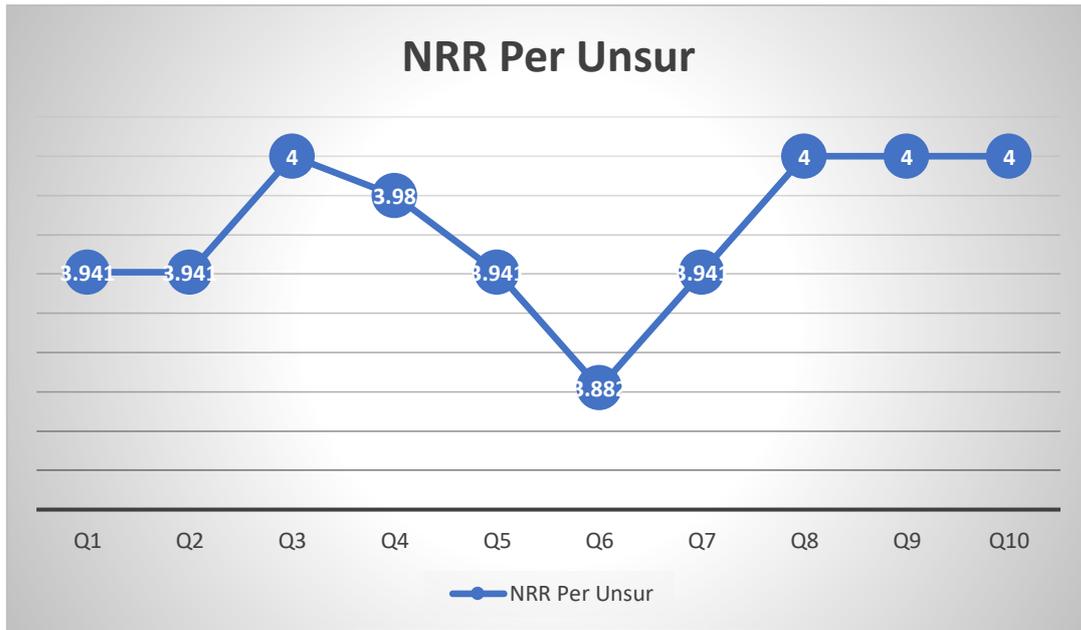
Tabel 17.
Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Tinggi Makassar

No	Unsur Pertanyaan	NRR
Q 1	Manipulasi Peraturan	3.941
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	3.941
Q 3	Menjual Pengaruh	4
Q 4	Transaksi Biaya	3.980
Q 5	Biaya Tambahan	3.941
Q 6	Hadiah	3.882
Q 7	Tranparansi Biaya	3.941
Q 8	Percaloan	4
Q 9	Perbuatan Curang	4
Q 10	Transaksi Rahasia	4
JUMLAH		39.627
NILAI RATA-RATA IPK		3,96

Keterangan :

Q1 - Q10 : Unsur-unsur Pertanyaan
NRR : **Nilai Rata-rata**
 IPK : Indeks Persepsi Anti Korupsi
 : **Jumlah NRR IPK**
 *) **Tertimbang**
 NRR Per Unsur : Jumlah nilai per unsur dibagi
 Jumlah kuesioner yang terisi

IPK : 3.96



Gambar 6
Indeks Persepsi Anti Korupsi PT Makassar

Indeks Persepsi Anti Korupsi tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada angka 81,26 – 100,00.

Tabel 18.
Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja
pada Pengadilan Tinggi Makassar

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi

4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi
---	-------------	----------------	---	---------------------

3.4. Kesan & Pesan Responden

	Kesan & Pesan
1	Baik
2	Meningkatkan pelayanan pelayanan lagi
3	Meningkatkan pelayanan pelayanan lagi
4	-
5	Mari kita sama-sama memberantas Korupsi
6	Pelayanan sangat baik dan memuaskan
7	Semoga dipertahankan
8	Cukup
9	layan yang diberikan sangat memuaskan, tetap dipertahankan dan bila dapat ditingkatkan lagi
10	Tetap semangat dalam memberikan layanan yang terbaik
11	baik
12	Petugas PTSP PT Makassar bekerja sangat baik dan profesional, tetap dipertahankan
13	Baik
14	TETAP DIPERTAHANKAN
15	-
16	tetap semangat dalam memberikan pelayanan. Trimakasih
17	Pelayanan yang diberikan ... mantap
18	Tetap pertahankan layanannya
19	mantap renprog
20	...
21	Kinerja sudah baik dan dipertahankan
22	Sudah bagus dan mohon dipertahankan
23	Mantap
24	Semoga pelayanannya semakin meningkat
25	Pertahankan dan tingkatkan pelayanan anti korupsi ke arah yang lebih baik
26	Sudah baik dan dipertahankan
27	Saya menerima pelayanan dengan baik dan sesuai prosedur
28	Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Makassar sudah cukup baik, semoga dapat selalu dipertahankan.
29	Sudah bagus dan mohon dipertahankan
30	pelayanan semakin ditingkatkan
31	Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Makassar sudah cukup baik, semoga dapat selalu dipertahankan.
32	Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Makassar sudah cukup baik, semoga dapat selalu dipertahankan.
33	Saya menerima pelayanan dengan baik di Pengadilan Tinggi Makassar
34	Baik

35	Baik
36	Bagus
37	Pelayanan Mudah, Transparan, dan Ramah, Pertahankan
38	Pelayanan yg ada di pengadilan Tinggi sngat memuaskan
39	bagus
40	Sudah bagus, mohon dipertahankan.
41	Pelayanan Bagus, Cepat, dan Mudah, Terus Pertahankan dan tetap berinovasi
42	Mohon dipertahankan layanannya
43	Pelayanan sudah baik, tetap pertahankan dan terus berorientasi pada pelayanan
44	Pelayanan sudah sesuai dan mohon dipertahankan
45	Pelayanan terbaik
46	Tetap memberikan pelayanan prima..
47	Pelayanan terbaik
48	Sdah bagus dan smga bsa dtingkatkan...
49	Kualitas dipertahankan
50	Pelayanannya mantap
51	Sudah sangat baik,

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Makassar diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Tinggi Makassar memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,96** atau **99,07%** masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut :

Tabel 19
Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK) pada survei Triwulan 1 tahun 2023

No	Unsur Penilaian	NRR Per Unsur	NRR Tertimbang	Peringkat	Nilai IPK	Kategori
1	Manipulasi Peraturan	3.941	0.394	9		A (Bersih dari Korupsi)
2	Penyalahgunaan Jabatan	3.941	0.394	8		
3	Menjual Pengaruh	4	0.400	1		
4	Transaksi Biaya	3.980	0.398	5		
5	Biaya Tambahan	3.941	0.394	7		
6	Hadiah	3.882	0.388	10		
7	Transparansi Biaya	3.941	0.394	6		
8	Percaloan	4	0.400	2		
9	Perbuatan Curang	4	0.400	3		
10	Transaksi Rahasia	4	0.400	4		
Jumlah		39.627	3.963		99.07	

Dari tabel 19 juga dapat diketahui 3 unsur penilaian yang mendapat skor terendah, yaitu :

1. Hadiah (peringkat ke 10)

Bentuk Pertanyaan : Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?

2. Manipulasi Peraturan (peringkat ke 9)

Bentuk Pertanyaan : Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku ?

3. Penyalahgunaan Jabatan (peringkat ke 8)

Bentuk Pertanyaan : Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?

Dari tabel 19 juga dapat diketahui 3 unsur penilaian yang mendapat skor tertinggi, yaitu :

1. Menjual Pengaruh (peringkat ke 1)

Bentuk Pertanyaan : Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?

2. Percaloan (peringkat ke 2)

Bentuk Pertanyaan : Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?

3. Perbuatan Curang (peringkat ke 3)

Bentuk Pertanyaan : Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?

Untuk selengkapnya tabulasi perhitungan survei terdapat dalam lampiran 2.



4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2023 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,260 atau masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi.

Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator **Hadiah** memiliki indeks paling rendah di antara

indikator lainnya yaitu 3,882 dan tergolong dalam indikator kinerja bersih dari korupsi.

4.3. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator Hasil Analisa ini perlu dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan kami prioritaskan dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya dengan jangka pendek kurang dari 3 bulan.

Rencana tindak lanjut perbaikan hasil Survei Persepsi Anti Korupsi dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 20
Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu	Penanggung-jawab
1.	Hadiah	<ul style="list-style-type: none"> Tetap memutar Audio Public Campaign di lingkungan Pengadilan Tinggi Makassar 	Setiap hari kerja, diputar setiap 2 jam.	Hakim Tinggi Pengawas PTSP.
2.	Manipulasi Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> Mengupdate informasi pada seluruh media informasi yang dimiliki PT Makassar. 	Setiap bulan dimonitoring secara berkala.	Hakim Tinggi Pengawas PTSP.
3.	Penyalahgunaan Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> Tetap memutar Audio Public Campaign di lingkungan Pengadilan Tinggi Makassar 	Setiap hari kerja, diputar setiap 2 jam.	Hakim Tinggi Pengawas PTSP.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Kuesioner.
2. Data Responden.

Lampiran 1 : Kuesioner

Dapat diakses pada website Pengadilan Tinggi Makassar
esurvey.pt-makassar.go.id

Lampiran 2 : Data Responden

PENGELOLAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN

UNIT PELAYANAN : UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN TINGGI
MAKASSAR

Data Responden Yang Diunduh dari Aplikasi SISUPER
Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI :

	Domisili	Umur / Jenis Kelamin	Pendidikan / Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
1	SULAWESI SELATAN	59 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	SULAWESI SELATAN	58 Tahun Perempuan	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	SULAWESI SELATAN	58 Tahun Perempuan	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	SULAWESI SELATAN	59 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	SULAWESI SELATAN	57 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	SULAWESI SELATAN	45 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	SULAWESI SELATAN	52 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	SULAWESI SELATAN	42 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	SULAWESI SELATAN	48 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	SULAWESI SELATAN	48 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	SULAWESI SELATAN	45 Tahun Perempuan	S3PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	SULAWESI SELATAN	41 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	SULAWESI SELATAN	50 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

14	SULAWESI SELATAN	58 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	SULAWESI SELATAN	42 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	SULAWESI SELATAN	38 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4
17	SULAWESI SELATAN	41 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	SULAWESI SELATAN	46 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	SULAWESI SELATAN	40 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	SULAWESI SELATAN	50 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	SULAWESI SELATAN	41 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	SULAWESI SELATAN	46 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	SULAWESI SELATAN	52 Tahun Laki-laki	S1PNS	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4
24	SULAWESI SELATAN	44 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	SULAWESI SELATAN	51 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	SULAWESI SELATAN	59 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	SULAWESI SELATAN	52 Tahun Perempuan	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	SULAWESI SELATAN	55 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	SULAWESI SELATAN	46 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	SULAWESI SELATAN	56 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4
31	SULAWESI SELATAN	49 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
32	SULAWESI SELATAN	56 Tahun Laki-laki	S3PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	SULAWESI SELATAN	52 Tahun Perempuan	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
34	SULAWESI SELATAN	39 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35	SULAWESI SELATAN	52 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36	SULAWESI SELATAN	57 Tahun Laki-laki	S3PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	SULAWESI SELATAN	39 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

38	SULAWESI SELATAN	57 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
39	SULAWESI SELATAN	49 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	1	4	1	4	4	4
40	SULAWESI SELATAN	43 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
41	SULAWESI SELATAN	55 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
42	SULAWESI SELATAN	40 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
43	SULAWESI SELATAN	43 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
44	SULAWESI SELATAN	40 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
45	SULAWESI SELATAN	55 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
46	SULAWESI SELATAN	43 Tahun Perempuan	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
47	SULAWESI SELATAN	55 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
48	SULAWESI SELATAN	47 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
49	SULAWESI SELATAN	43 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
50	SULAWESI SELATAN	42 Tahun Perempuan	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
51	SULAWESI SELATAN	54 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4